



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

TAHUN

2025

BerAKHLAK  



Jl. Mahoni No.3 , Monjok Barat, Selaparang, Kota Mataram - NTB 83122

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan Berkah dan Rahmat-Nya sehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Tahun 2025 dapat kami sajikan.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram adalah sebagai tindak lanjut dari Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 16516/SEK/OT1.6/XII/2025 tanggal 30 Desember 2025 perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 yang sudah tersusun ini menyajikan informasi yang disertai data mengenai pelaksanaan kegiatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram yang bersumber dari unit pengolah data pada bagian Kepaniteraan maupun Kesekretariatan.

Informasi dan data yang tersaji merupakan kompilasi kegiatan yang juga melibatkan satuan kerja di seluruh wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Semoga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 ini dapat memberikan informasi yang dapat menggambarkan pelaksanaan kegiatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram dan seluruh satuan kerja di wilayah hukumnya selama Tahun 2025. Dan semoga kekurangan dari laporan ini menjadi koreksi bagi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram dalam pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya. Namun jika ada kelebihannya akan menjadikan semangat bagi kami untuk dapat dipertahankan bahkan lebih ditingkatkan untuk pelaksanaan kegiatan tahun-tahun mendatang.

Mataram, 29 Januari 2026

Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram,



AK. Setiyono



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Wilayah Hukum	iv
Bab I Pendahuluan	1
A. Kebijakan Umum Pengadilan	1
B. Visi dan Misi	3
C. Indikator Kinerja Utama	4
Bab II A. Keadaan Perkara di Peradilan Tata Usaha Negara	6
1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama	6
2. Keadaan Perkara Tingkat Banding	7
3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	9
4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	9
B. Penyelesaian Perkara	10
1. Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	10
2. Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali	14
C. Program Prioritas Nasional	15
Bab III Sumber Daya Manusia Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/Golongan/Pendidikan	18
A. Mutasi	20
B. Promosi	25
C. Pensiun	26
D. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)	27
Bab IV Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi	33
A. Pengelolaan Keuangan	33
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	38
C. Pengelolaan Teknologi Informasi	42



Bab V Peningkatan Pelayanan Publik	44
• Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan	44
• Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).....	44
• Inovasi Pelayanan Publik.....	46
Bab VI Pengawasan.....	50
A. Internal.....	50
B. Evaluasi.....	50
Bab VII Penutup	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Rekomendasi.....	53
Lampiran	54



WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM



GEDUNG KANTOR PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
JL. MAHONI NO.3 KEL. MONJOK BARAT, KEC. SELAPARANG, KOTA MATARAM



Peta Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Meliputi : Daerah Hukum Propinsi Bali, NTB, NTT.



BAB I PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PENGADILAN

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara RI 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram dan tertib. Dalam usaha mencapai tujuan tersebut pemerintah melalui aparturnya di bidang Tata Usaha Negara (TUN) diharuskan berperan positif aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Menyadari sepenuhnya peran positif aktif pemerintah dalam kehidupan masyarakat, maka pemerintah perlu mempersiapkan langkah menghadapi kemungkinan timbulnya benturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara badan atau pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat.

Untuk menyelesaikan sengketa tersebut dari segi hukum perlu dibentuk Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai bagian pembangunan hukum nasional yang berwatak dan bersifat integral serta dilaksanakan berkesinambungan sebagaimana diamanatkan oleh Ketetapan MPR RI No. II / MPR / 1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang ditugasi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa di bidang Tata Usaha Negara.

Memang peradilan di bidang Tata Usaha Negara merupakan lembaga baru dalam tatanan hukum Indonesia dan pembentukannya memerlukan perencanaan serta persiapan yang sebaik-baiknya sehingga pelaksanaannya perlu dilakukan secara bertahap. Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikeluarkan pada tahun 1986 yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara baru bisa diterapkan 5 (lima) tahun kemudian dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang No 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan bila timbul benturan kepentingan, perselisihan / sengketa antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat yang dapat merugikan atau menghambat jalannya pembangunan nasional.



Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung RI sebagai Pengadilan Negara tertinggi.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram dibentuk dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, dan di resmikan pada tanggal 5 Desember 2022 adalah merupakan Pengadilan Tingkat Banding.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, maka Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram meliputi daerah Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang No 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dan yang yang dimintakan Pemeriksaan Banding oleh para pencari keadilan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, yaitu dari :

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar;
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;
3. Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Disamping itu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram juga mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan:

- a. Sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di daerah hukumnya, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertindak sebagai tingkat pertama dan terakhir;
- b. Sengketa yang telah melalui upaya administratif, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertindak sebagai Pengadilan Tingkat Pertama (Pasal 48 jo. Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara)



sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang No 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial bagi perkara banding;
- b. Memberikan pelayanan teknis yustisial untuk perkara Tingkat Pertama, Perkara tertentu sesuai ketentuan Undang – Undang yang berlaku.
- c. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding dan administrasi peradilan lainnya;
- d. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya;
- e. Mengadakan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya;
- f. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara (Tata Usaha dan Rumah Tangga, Keuangan dan Pelaporan, Kepegawaian dan TI, Rencana Program dan Anggaran);
- g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum Tata Usaha Negara, pelayanan riset / penelitian.

B. VISI DAN MISI

Adapun Visi Badan Peradilan (yang juga merupakan penegasan dan perwujudan kehendak atau cita-cita rakyat Indonesia di bidang pelaksanaan kekuasaan kehakiman) telah dirumuskan oleh Mahkamah Agung dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2014 – 2035 sebagai berikut :

Visi Badan Peradilan adalah :

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”

Oleh karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram merupakan bagian dari Badan Peradilan, maka visi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram mengacu dan berpedoman pada visi Badan Peradilan tersebut, yaitu :



Visi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram : *"Terwujudnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Yang Agung"* Visi tersebut diupayakan untuk dicapai melalui misi. Sebagaimana dirumuskan oleh Mahkamah Agung dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2014 – 2035, adapun Misi Badan Peradilan adalah sebagai berikut di bawah ini :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. Adapun Reviu ke-1 Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tgl. 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029 dapat digambarkan pada matriks di bawah ini :

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern.	1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.
		1.2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.



		1.3	Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju.
		1.4	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.
		1.5	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.
		1.6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan.
		1.7	Persentase perkara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court.
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.	Indeks kepatuhan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang diterapkan.	
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.
		3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01).
		3.3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (05).
		3.4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01).
		3.5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (05).
		3.6	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan



BAB II

KEADAAN PERKARA DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA

A. KEADAAN PERKARA

1. KEADAAN PERKARA TINGKAT PERTAMA

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram hanya meliputi 3 (tiga) wilayah Provinsi saja. Berdasarkan Penjelasan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang tersebut, daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram meliputi wilayah Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Berikut ini merupakan Keadaan Perkara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram (PTUN Mataram), Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar (PTUN Denpasar), dan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang (PTUN Kupang).

Tabel Keadaan Perkara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram sebagai Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2025.

PTTUN Mataram	Sisa	Masuk	Putus	Cabut	Dissmisal	Perlawanan	Sisa Akhir
	1	2	1	0	0	0	2

Tabel Keadaan Perkara Tingkat Pertama pada Pengadilan Tata Usaha Negara Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Tahun 2025.

No.	Satuan Kerja	Sisa	Masuk	Putus	Cabut	Dissmisal	Perlawanan	Sisa Akhir
1.	PTUN Mataram	8	62	56	0	4	3	7
2.	PTUN Denpasar	19	40	35	10	5	0	9
3.	PTUN Kupang	15	45	33	3	1	0	23
Jumlah		42	147	124	13	10	3	39



2. KEADAAN PERKARA TINGKAT BANDING

Pada tahun 2025, perkara banding yang masuk di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram sejumlah 55 Perkara dan sisa perkara tahun lalu sejumlah 2 perkara. Dari keseluruhan perkara di tahun 2025 dan sisa tahun lalu sejumlah 57 Perkara, telah diselesaikan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram sejumlah 54 Perkara, sehingga sisa perkara yang belum diselesaikan dan diputus di tahun 2025 adalah sejumlah 3 Perkara, yaitu perkara Nomor: 53/B/2025/PT.TUN.MTR, 54/B/2025/PT.TUN.MTR, dan 55/B/2025/PT.TUN.MTR. Berikut dapat digambarkan jenis perkara tingkat banding di tahun 2025 dalam matriks tabel dan diagram di bawah ini:

Keadaan Perkara Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Tahun 2025.

PTTUN Mataram	Sisa	Masuk	Dismissal	Perlawanan	Cabut	Putus	Sisa Akhir
	2	55	-	-	-	54	3

Rincian Keadaan Perkara Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Tahun 2025.

No	Jenis Perkara	Sisa	Masuk	Dismis -sal	Perlawaa- nan	Ca but	Putus	Sisa Akhir
1	Pertanahan	2	37	-	-	-	38	1
2	Kepegawaian	-	8	-	-	-	8	0
3	Perijinan	-	-	-	-	-	-	-
4	Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-
5	Tender/Pengadaa n Barang Dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-
6	Badan Hukum/Parpol	-	-	-	-	-	-	-
7	Kades & Perangkat Desa	-	2	-	-	-	1	1



8	Proses Pemilu	-	-	-	-	-	-	-
9	P A W	-	-	-	-	-	-	-
10	Ketenagakerjaan	-	-	-	-	-	-	-
11	K I P	-	-	-	-	-	-	-
12	Pengadaan Tanah	-	-	-	-	-	-	-
13	Fiktif Positif	-	-	-	-	-	-	-
14	Penyalahgunaan Wewenang	-	-	-	-	-	-	-
15	Tindakan Admin Pemerintahan	-	5	-	-	-	5	0
16	Lain-Lain	-	3	-	-	-	2	1
JUMLAH		2	55	-	-	-	54	3

Keadaan Perkara yang diajukan banding pada pengadilan tingkat pertama sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram pada Tahun 2025, termasuk sisa perkara dari Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang belum putus, digambarkan sebagai berikut:

Tabel Pengadilan Pengaju Perkara Banding Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Tahun 2025.

No	Satuan Kerja	Sisa	Masuk Banding	Putus	Sisa Akhir
1	PTUN Mataram	3	20	18	5
2	PTUN Denpasar	0	20	17	3
3	PTUN Kupang	3	17	19	1
Jumlah		6	57	54	9



3. KEADAAN PERKARA TINGKAT KASASI

Pada tahun 2025, sisa perkara tahun lalu yang mengajukan upaya hukum Kasasi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram yaitu sejumlah 1 perkara (Nomor : 2/G/2024/PT.TUN.MTR) dan telah diputus tahun 2025, untuk perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi tidak ada. Rincian data keadaan perkara Kasasi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram terurai dalam tabel berikut:

Tabel Keadaan Perkara Tingkat Kasasi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram sePengadilan Tingkat Pertama Tahun 2025.

Pengadilan	Sisa	Permohonan Kasasi	Putus	Sisa Akhir
PT TUN Mataram	1	0	1	0

Perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi oleh Pengadilan Tingkat Pertama Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram yaitu: sisa perkara tahun lalu terdapat 25 (dua puluh lima) pengajuan permohonan Kasasi. Perkara Kasasi masuk sejumlah 35 (tiga puluh lima) perkara, perkara kasasi yang telah diputus oleh Mahkamah RI berjumlah 41 (empat puluh satu) perkara dan yang belum diputus oleh Mahkamah Agung RI berjumlah 19 (sembilan belas) perkara, Perkara yang belum diputus tersebut masuk ke dalam kategori sisa perkara kasasi di tahun 2025, rincian data keadaan perkara Kasasi pada Pengadilan Tingkat Pertama Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Keadaan Perkara Tingkat Kasasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Tahun 2025.

No.	Pengadilan	Sisa	Masuk Kasasi	Putus	Sisa Akhir
1	PTUN Mataram	2	10	6	6
2	PTUN Denpasar	16	13	22	7
3	PTUN Kupang	7	12	13	6
Jumlah		25	35	41	19

4. KEADAAN PERKARA TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI

Perkara yang diselesaikan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, belum ada yang mengajukan Peninjauan Kembali di tahun 2025. Sedangkan terhadap perkara yang diajukan Peninjauan Kembali oleh Pengadilan Tingkat Pertama Sewilayah



Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram di Tahun 2025, sejumlah 14 (empat belas) perkara dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram sebagai Pengadilan Tingkat Pertama.

Pengadilan	Peninjauan Kembali
PT TUN Mataram	0

Tabel Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali pada Pengadilan Tata Usaha Negara Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Tahun 2025.

No.	Pengadilan	Sisa	Masuk Peninjauan Kembali	Putus	Sisa Akhir
1	PTUN Mataram	1	3	2	2
2	PTUN Denpasar	2	9	6	5
3	PTUN Kupang	0	2	0	2
Jumlah		3	14	8	9

B. PENYELESAIAN PERKARA

1. PENYELESAIAN PERKARA SECARA TEPAT WAKTU

Keseluruhan perkara banding yang diterima, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram di Tahun 2025, telah diselesaikan dan diputus tepat waktu sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, yaitu dalam waktu 5 (lima) bulan di tingkat pertama dan 3 (tiga) bulan di tingkat banding.

**Tabel Waktu Penyelesaian Perkara Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Tahun 2025.**

NO	Wilayah Pengadilan Tinggi	Rentang Waktu Memutus				Ket.
		1 - 3 Bulan	3 - 6 Bulan	6 - 12 Bulan	> 12 Bulan	
1	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram sebagai Pengadilan Tingkat Banding	√	-	-	-	Perkara yang diputus sejumlah 54 Perkara

NO.	NOMOR PERKARA	0 - 3 BULAN	3 - 6 BULAN	6 - 12 BULAN	> 12 BULAN	KETERANGAN
1	57/B/2024/PT.TUN.MTR	√	-	-	-	37 hari
2	58/B/2024/PT.TUN.MTR	√	-	-	-	37 hari
3	1/B/TF/2025/PT.TUN.MTR	√	-	-	-	40 hr
4	2/B/2025/PT.TUN.MTR	√	-	-	-	30 hr
5	3/B/2025/PT.TUN.MTR	√	-	-	-	28 hr
6	4/B/2025/PT.TUN.MTR	√	-	-	-	21 hr
7	5/B/2025/PT.TUN.MTR	√	-	-	-	22 hr
8	6/B/2025/PT.TUN.MTR	√	-	-	-	21 hr
9	7/B/2025/PT.TUN.MTR	√	-	-	-	22 hr
10	8/B/2025/PT.TUN.MTR	√	-	-	-	21 hr
11	9/B/2025/PT.TUN.MTR	√	-	-	-	46 hr
12	10/B/2025/PT.TUN.MTR	√	-	-	-	19 hr
13	11/B/2025/PT.TUN.MTR	√	-	-	-	41 hr



14	12/B/TF/2025/PT.TUN.MTR	√	-	-	-	42 hr
15	13/B/2025/PT.TUN.MTR	√	-	-	-	30 hr
16	14/B/TF/2025/PT.TUN.MTR	√	-	-	-	34 hr
17	15/B/2025/PT.TUN.MTR	√	-	-	-	36 hr
18	16/B/2025/PT.TUN.MTR	√	-	-	-	16 hr
19	17/B/2025/PT.TUN.MTR	√	-	-	-	22 hr
20	18/B/TF/2025/PT.TUN.MTR	√	-	-	-	52 hr
21	19/B/2025/PT.TUN.MTR	√	-	-	-	33 hr
22	20/B/2025/PT.TUN.MTR	√	-	-	-	29 hr
23	21/B/2025/PT.TUN.MTR	√	-	-	-	36 hr
24	22/B/2025/PT.TUN.MTR	√	-	-	-	48 hr
25	23/B/2025/PT.TUN.MTR	√	-	-	-	23 hr
26	24/B/2025/PT.TUN.MTR	√	-	-	-	35 hr
27	25/B/2025/PT.TUN.MTR	√	-	-	-	36 hr
28	26/B/2025/PT.TUN.MTR	√	-	-	-	28 hr
29	27/B/2025/PT.TUN.MTR	√	-	-	-	28 hr
30	28/B/2025/PT.TUN.MTR	√	-	-	-	29 hr
31	29/B/2025/PT.TUN.MTR	√	-	-	-	20 hr
32	30/B/2025/PT.TUN.MTR	√	-	-	-	32 hr
33	31/B/2025/PT.TUN.MTR	√	-	-	-	20 hr
34	32/B/2025/PT.TUN.MTR	√	-	-	-	21 hr
35	33/B/2025/PT.TUN.MTR	√	-	-	-	21 hr



36	34/B/2025/PT.TUN.MTR	√	-	-	-	30 hr
37	35/B/2025/PT.TUN.MTR	√	-	-	-	13 hr
38	36/B/2025/PT.TUN.MTR	√	-	-	-	19 hr
39	37/B/2025/PT.TUN.MTR	√	-	-	-	24 hr
40	38/B/2025/PT.TUN.MTR	√	-	-	-	20 hr
41	39/B/2025/PT.TUN.MTR	√	-	-	-	17 hr
42	40/B/2025/PT.TUN.MTR	√	-	-	-	17 hr
43	41/B/2025/PT.TUN.MTR	√	-	-	-	20 hr
44	42/B/2025/PT.TUN.MTR	√	-	-	-	30 hr
45	43/B/2025/PT.TUN.MTR	√	-	-	-	38 hr
46	44/B/TF-LH/2025/PT.TUN.MTR	√	-	-	-	31 hr
47	45/B/2025/PT.TUN.MTR	√	-	-	-	45 hr
48	46/B/2025/PT.TUN.MTR	√	-	-	-	21 hr
49	47/B/2025/PT.TUN.MTR	√	-	-	-	29 hr
50	48/B/2025/PT.TUN.MTR	√	-	-	-	22 hr
51	49/B/2025/PT.TUN.MTR	√	-	-	-	17 hr
52	50/B/2025/PT.TUN.MTR	√	-	-	-	21 hr
53	51/B/2025/PT.TUN.MTR	√	-	-	-	10 hr
54	52/B/2025/PT.TUN.MTR	√	-	-	-	9 hr
JUMLAH		54 Perkara	-	-	-	-



Waktu penyelesaian perkara Pada Pengadilan Tata Usaha Negara sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, digambarkan melalui tabel, sebagai berikut:

Tabel Waktu Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Tahun 2025.

NO	Pengadilan	Rentang Waktu Memutus (Bulan)*				Ket.
		>3	3 - 5	5 - 12	> 12	
1	PTUN Mataram	19	40	4	0	*Jumlah Perkara
2	PTUN Denpasar	8	12	17	0	
3	PTUN Kupang	19	40	4	0	
Jumlah		46	92	25	0	

2. PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING, KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI

Berdasarkan keadaan perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram sebagai Tingkat Pertama, pada tahun 2025 telah diputus 1 perkara dan tidak mengajukan upaya hukum kasasi maupun peninjauan kembali, dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Perkara Putus yang Tidak Diajukan Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram.

PTTUN Mataram	Perkara Putus	Diajukan Upaya Hukum		Tidak Ajukan Upaya Hukum	
		Kasasi	PK	Kasasi	PK
Jumlah	1	0	0	0	0
Persen	100%	0%	0%	0%	0%

Sedangkan perkara yang tidak diajukan upaya hukum Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, digambarkan melalui tabel, sebagai berikut:



Tabel Perkara Putus yang Tidak Diajukan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali pada Pengadilan Tata Usaha Negara Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Tahun 2025.

Pengadilan (PTUN)	Perkara Putus	Diajukan Upaya Hukum			Tidak Ajukan Upaya Hukum		
		Banding	Kasasi	PK	Banding	Kasasi	PK
Mataram	63	20	10	3	43	8	52
Denpasar	50	20	13	9	30	7	13
Kupang	34	17	12	2	12	7	11
Jumlah	147	57	35	14	85	22	76

C. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

1. POSBAKUM

Pos Bantuan Hukum adalah Layanan yang dibentuk oleh Pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tingkat Banding untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advice hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram dalam rangka pemerataan akses dan pelayanan peradilan bagi masyarakat yang kurang mampu (Justice For All), maka disusunlah suatu program pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat dengan dibiayai oleh negara.

Pemberian pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram meliputi:

- Pemberian informasi, dokumen, konsultasi dan advice hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan bantuan hukum;
- Pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Penjamin dan pemenuhan hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan secara profesional;
- Melayani konsultasi hukum tata usaha negara;



Kegiatan pelaksanaan Pos Pelayanan Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram telah dilaksanakan sejak tahun 2025 sampai dengan sekarang. Pada tahun 2025 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram menerima anggaran DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Posbakum sebesar Rp. 16.600.000,- (Enam Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk 59 orang yang dilayani. Anggaran tersebut telah terealisasi sebesar Rp. 16.583.600,- (Enam Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah) atau 99,90%.

Data Pelayanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel Jumlah Pelayanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Tahun 2025.

Jumlah Layanan Posbakum	Bulan Ke-												Jumlah
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	4	4	4	4	4	4	4	8	13	2	4	4	59

Tabel Jumlah Pelayanan Pos Bantuan Hukum SeWilayah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Tahun 2025.

No.	Pengadilan	Bulan Ke-												Jumlah
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	PTUN Mataram	9	12	10	9	8	8	8	10	9	9	13	11	116
2.	PTUN Denpasar	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96
3.	PTUN Kupang	6	7	15	8	8	8	8	8	8	8	13	12	109



2. SIDANG KELILING/PELAYANAN TERPADU

Tidak ada pelaksanaan sidang keliling pada tahun 2025 pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram. Adapun pelayanan terpadu dilaksanakan pada penyediaan layanan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yang terdiri dari pelayanan pada Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan berdasarkan Pasal 14 Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Nomor 462/DJMT/KEP/8/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pada Pengadilan TUN Mataram menerima anggaran DIPA 05 untuk sidang di luar gedung pengadilan sebesar Rp. 27.250.000,- untuk 1 perkara yang telah diserap sebesar 27.248.800,-. Pengadilan TUN Denpasar layanan sidang di luar gedung pengadilan sudah dilaksanakan dengan DIPA 05 sebesar 20.980.000 terealisasi 1 perkara Nomor: 22/G/2025/PTUN.DPS. Sedangkan Pengadilan TUN Kupang anggaran DIPA 05 sebesar Rp. 48.900.00 tereserap sebesar 30.159.993,- presentase 99,8% dengan 1 perkara Nomor; 7/G/2025/PTUN.KPG.

3. PERKARA PRODEO (PEMBEBASAN BIAAYA PERKARA)

Prodeo adalah pembebasan biaya perkara di pengadilan yang mana biaya tersebut dibiayai negara melalui anggaran Mahkamah Agung sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Tidak ada anggaran DIPA Perkara Prodeo pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram tahun 2025. Implementasi perkara Prodeo di Pengadilan Tata Usaha Negara Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel Jumlah Perkara Prodeo pada Pengadilan Tata Usaha Negara Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Tahun 2025.

No.	Pengadilan	Bulan Ke-											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	PTUN Mataram	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	PTUN Denpasar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	PTUN Kupang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA KOMPOSISI BERDASARKAN KEPANGKATAN/GOLONGAN/PENDIDIKAN

Pegawai Negeri Sipil sebagai Aparatur Pemerintah yang melayani masyarakat dituntut untuk selalu berupaya meningkatkan dan mengembangkan sikap profesionalnya, yang diwujudkan dengan peningkatan wawasan berfikir kreatifitas dan bertanggungjawab. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang bertugas dilingkungan Peradilan, pemahaman sikap profesional dirasakan sangat penting, hal ini guna mewujudkan Aparatur Peradilan yang bersih dan berwibawa dalam memberikan pelayanan prima yang berkualitas, cepat dan tepat.

Pembinaan Kepegawaian Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia secara umum meliputi : Formasi Pegawai, Rekrutmen Pegawai dan Pengangkatan, Pendidikan dan Pelatihan, Penempatan, Pengangkatan dalam Jabatan, Kenaikan Pangkat, Pola Pembinaan Karier Hakim, Kepaniteraan, Kesekretariatan, dan Kejurusitaan, serta Pemberhentian Pegawai.

Berikut akan ditampilkan komposisi Sumber Daya Manusia se wilayah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram berdasarkan Jabatan, Pangkat dan Golongan, serta Pendidikan.

Komposisi SDM wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram :

NO.	URAIAN	PTTUN MATARAM	PTUN MATARAM	PTUN DENPAS AR	PTUN KUPANG	TOTAL
1	2	3	4	5	6	1
1.	Ketua	1	1	1	1	4
2.	Wakil Ketua	1	1	1	1	4
3.	Hakim Tinggi	5	-	-	-	5
4.	Hakim	-	1 2	1 0	9	31
5.	Panitera	1	1	1	1	4
6.	Sekretaris	1	1	1	1	4
7.	Kabag. Perencanaan dan Kepegawaian	1	-	-	-	1
8.	Kabag. Umum dan Keuangan	1	-	-	-	1
9.	Panitera Muda Perkara	1	1	1	1	4
10.	Panitera Muda Hukum	1	1	1	1	4
11.	Kasubag. Renprog dan Anggaran	1	-	-	-	1
12.	Kasubag. Kepegawaian dan TI	1	-	-	-	1



13.	Kasubag. TU dan RT	1	-	-	-	1
14.	Kasubag. Keuangan dan Pelaporan	1	-	-	-	1
15.	Kasubag. Perencanaan, TI dan Pelaporan	-	1	1	1	3
16.	Kasubag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	-	1	1	1	3
17.	Kasubag. Umum dan Keuangan	-	1	1	1	3
18.	Panitera Pengganti	4	7	1 0	6	27
20.	Jurusita Pengganti	1	1	2	3	7
21.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	1	-	2	-	3
22.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	2	-	-	-	2
23.	Pranata Keuangan APBN Penyelia	-	-	2	-	2
24.	Pranata Komputer Ahli Muda	-	1	-	-	1
25.	Pranata Komputer Ahli Pertama	-	-	1	1	2
26.	Operator - Penata Layanan Operasional	1	1	-	-	2
27.	Klerik - Analisis Perkara Peradilan	2	4	4	4	14
28.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	1	-	-	-	1
29.	Klerik - Penata Keprotokolan	1	-	-	-	1
30.	Teknisi Sarana dan Prasarana	1	1	1	1	4
31.	Arsiparis Terampil	-	-	1	-	1
32.	Klerik - Dokumentasi Hukum	-	2	1	1	4
33.	PPPK	7	6	1 0	7	30

**SDM Berdasarkan Pangkat dan Golongan:**

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1.	Pembina Utama	IV/e	3
2.	Pembina Utama Madya	IV/d	2
3.	Pembina Utama Muda	IV/c	7
4.	Pembina Tingkat I	IV/b	8
5.	Pembina	IV/a	7
6.	Penata Tingkat I	III/d	41
7.	Penata	III/c	14
8.	Penata Muda Tingkat I	III/b	13
9.	Penata Muda	III/a	44
10.	Pengatur Tingkat I	II/d	3
11.	Pengatur	II/c	4
12.	Golongan IX	IX	9
13.	Golongan VII	VII	4
14.	Golongan V	V	17

SDM Berdasarkan Pendidikan:

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	S-3/Doktor	3
2.	S-2/Magister	38
3.	S-1/Sarjana	107
4.	D-IV	1
5.	D-III	10
6.	SLTA/Sederajat	17

A. MUTASI.

Hakekatnya mutasi adalah bentuk perhatian Pimpinan terhadap bawahan. Mutasi dilakukan antara lain bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara Sumber Daya Manusia yang ada dengan komposisi pekerjaan atau jabatan, untuk memperluas atau menambah pengetahuan pegawai dan untuk menghindari kejenuhan pegawai pada rutinitas pekerjaan yang terkadang membosankan. Mutasi terkadang dapat dijadikan sebagai tahapan awal untuk mendapatkan promosi di waktu mendatang. Disamping perhatian internal, upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat adalah bagian terpenting dalam seluruh proses mutasi yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung RI. Berikut adalah daftar nama Hakim Tinggi, Hakim dan Pegawai yang



melaksanakan mutasi keluar dan masuk dari Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram :

Daftar nama Hakim Tinggi, Hakim dan Pegawai yang mutasi masuk ke wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram :

N o.	Nama	Satker Asal	Satker Tujuan	Keterangan
1	2	3	4	5
Pengadilan Tinggi TUN Mataram				
1.	AK SETIYONO, S.H., M.H.	PTTUN Palembang	PTTUN Mataram	Promosi dari Wakil Ketua menjadi Ketua
2.	BAIQ YULIANI, S.H.	PTUN Mataram	PTTUN Mataram	Promosi dari Ketua PTUN menjadi Hakim Tinggi
3.	ANNA LEONORA TEWERNUSSA, S.H., M.H.	PTUN Denpasar	PTTUN Mataram	Promosi dari Ketua PTUN menjadi Hakim Tinggi
4.	HENI HENDRARTA WIDYA SUKMANA KURNIAWAN, S.H., M.H.	PTUN Semarang	PTTUN Mataram	Promosi dari Wakil Ketua PTUN menjadi Hakim Tinggi
5.	LALU ERWIN MURYADI, S.H.	PTUN Mataram	PTTUN Mataram	Promosi dari Panmud Hukum Tingkat Pertama menjadi Panmud Hukum Banding
6.	SEKAR ARUM MUFAIZAH, S.T.	-	PTTUN Mataram	CPNS
7.	AULIA SHOLIHAT, S.I.Kom	-	PTTUN Mataram	CPNS
8.	M. IQBAL SYUHADA, S.Kom	-	PTTUN Mataram	CPNS
Pengadilan TUN Denpasar				
1.	I DEWA GEDE PUJA, S.H., M.H.	PTUN Bengkulu	PTUN Denpasar	Mutasi Ketua
2.	RYAN SURYA PRADHANA, S.H., M.H.	PTUN Pangkal Pinang	PTUN Denpasar	Mutasi Hakim



3.	GASA BAHAR PUTRA, S.H., M.H.	PTUN Kendari	PTUN Denpasar	Mutasi Hakim
4.	MAGHFIROTUN, S.H., M.H.	PTUN Banjarmasin	PTUN Denpasar	Promosi Hakim
5.	KARISSA FIDELIA, S.H., M.Kn.	PTUN Bandung	PTUN Denpasar	Promosi Hakim
6.	DHAFIRA JASTIANA, S.H., M.Kn.	PTUN Surabaya	PTUN Denpasar	Promosi Hakim
7.	ULFA SEPTIAN DIKA, S.H.	PTUN Yogyakarta	PTUN Denpasar	Promosi Hakim
8.	KURNIAWAN BAYU SETIAJI, S.H.	PTUN Palembang	PTUN Denpasar	Promosi Hakim
9.	KADEK DANENDRA PRAMATAMA, S.H.	-	PTUN Denpasar	CPNS
10	I WAYAN PARIARSANA, S.H.	-	PTUN Denpasar	CPNS
11	RESTY AYU WULANDARI, S.T.	-	PTUN Denpasar	CPNS
12	GAGAT MUKTI GUMELAR, A.Md.M.	-	PTUN Denpasar	CPNS
Pengadilan TUN Mataram				
1.	Dr. Nasrifal, S.H., M.H.	Kasubdirekt orat Dirjen Badilmiltun	PTUN Mataram	Promosi Menjadi Wakil Ketua
2.	Fitriana Kasiani, S.H.	Ptun Surabaya	PTUN Mataram	Promosi Hakim
3.	Pramudhita Andarjati, S.H.	PTUN Yogyakarta	PTUN Mataram	Promosi Hakim
4.	Rahmi Ernisepti, S.H.	PTUN Yogyakarta	PTUN Mataram	Promosi Hakim
5.	Mandala Minta Nugraha, S.H., M.H.	PTUN Yogyakarta	PTUN Mataram	Promosi Hakim
6.	Reny Wijayanti, S.H., M.Kn.	PTUN Yogyakarta	PTUN Mataram	Promosi Hakim



7.	Deddy Andhika Pradana, S.H.	PTUN Semarang	PTUN Mataram	Promosi Hakim
8.	I Putu Bhisama Labdajaya, S.H.	PTUN Semarang	PTUN Mataram	Promosi Hakim
9.	Adnan Shena Firdaus, S.H.	PTUN Semarang	PTUN Mataram	Promosi Hakim
10.	Agus Suraji, S.H.	PTTUN Mataram	PTUN Mataram	Promosi dari Panmud Hukum Menjadi Panitera
11.	Khairunisa, S.Kom., S.H.	PTTUN Mataram	PTUN Mataram	Promosi dari Pelaksana menjadi Kasubbag
Pengadilan TUN Kupang				
1.	Sandi Kurniawan, S.H.	PTUN Makassar	PTUN Kupang	Promosi Hakim
2.	Yoshelsa Wardhana, S.H.	PTUN Yogyakarta	PTUN Kupang	Promosi Hakim
3.	Prasetyo Nugroho, S.H.	PTUN Pekanbaru	PTUN Kupang	Promosi Hakim
4.	Deska Agriana Permatasari, S.H., M.Kn.	PTUN Semarang	PTUN Kupang	Promosi Hakim
5.	Komang Alit Antara, S.H., M.H.	PTUN Medan	PTUN Kupang	Promosi Hakim
6.	Putu Carina Sari Devi, S.H.	PTUN Serang	PTUN Kupang	Promosi Hakim
7.	I Putu Charles Wiarta Yasa, S.H.	-	PTUN Kupang	CPNS
8.	Ade Brian Bharta, S.H.	-	PTUN Kupang	CPNS
9.	Dunan Ginting, S.T.	-	PTUN Kupang	CPNS
10.	Rio Sanjaya Sirait, A.Md.	-	PTUN Kupang	CPNS



Daftar nama Hakim Tinggi, Hakim dan Pegawai yang mutasi keluar dari wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram :

N o.	Nama	Satker Asal	Satker Tujuan	Keterangan
1	2	3	4	5
Pengadilan Tinggi TUN Mataram				
1.	Dr. DISIPLIN F. MANAO, S.H., M.H.	PTTUN Mataram	PTTUN Medan	Mutasi Ketua
2.	INDARYADI, S.H., M.H.	PTTUN Mataram	PTTUN Surabaya	Mutasi Hakim
3.	SUBUR MS, S.H., M.H.	PTTUN Mataram	PTTUN Mandao	Promosi Wakil Ketua
4	HENI HENDRARTA WIDYA SUKMANA KURNIAWAN, S.H., M.H.	PTTUN Mataram	Bawas MA	Mutasi Hakim
5.	AGUS SURAJI, S.H.	PTTUN Mataram	PTUN Mataram	Promosi Menajdi Panitera
PTUN Denpasar				
1.	ANNA LEONORA TEWERNUSSA, S.H., M.H.	PTUN Denpasar	PTTUN Mataram	Promosi Hakim Tinggi
2.	DEWI YUSTITIANI, S.H., M.Kn.	PTUN Denpasar	PTUN Yogyakarta	Mutasi Hakim
PTUN Mataram				
1.	ABDUL KADIR, S.Ag., S.H.	PTUN Mataram	PTUN Makassar	Mutasi Panitera
2.	L. ERWIN MURYADI, S.H.	PTUN Mataram	PTTUN Mataram	Promosi menjadi Panitera Muda Tingkat Banding
3.	BAIQ YULIANI, S.H.	PTUN Mataram	PTTUN Mataram	Promosi menjadi Hakim Tinggi
4.	RAHMADI, S.H.	PTUN Mataram	PTUN Surabaya	Promosi menjadi Sekretaris
5.	TAUFIK RAHMAN, S.E., M.M.	PTUN Mataram	PTUN Serang	Mutasi Sekretaris
6.	CI SURITAMI	PTUN Mataram	PA Depok	Mutasi Sekretariatan
PTUN Kupang				
		NIHIL		

**B. PROMOSI.**

Promosi adalah proses kegiatan pemindahan pegawai dari suatu jabatan kepada jabatan lain yang lebih tinggi. Dengan demikian promosi akan selalu diikuti oleh tugas, tanggung jawab dan wewenang yang lebih tinggi dari jabatan yang diduduki sebelumnya. Dalam rangka pengembangan dan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil dipandang perlu melaksanakan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan, baik Jabatan Struktural maupun Fungsional.

Sesuai dengan prinsip *The Right Man in The Right Place*, bagi seorang Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, yang akan diusulkan untuk menduduki suatu jabatan struktural tertentu diperlukan penilaian dari segala aspek dalam suatu pertimbangan yang obyektif, yang nantinya dipakai sebagai bahan rekomendasi bagi Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram untuk mengusulkan usulan tersebut ke Mahkamah Agung RI.

**Promosi Jabatan Di Lingkungan
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Tahun 2025**

No.	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Keterangan
1	2	3	4	5
PTUN DENPASAR				
1.	Drs. Anak Agung Gede Sedana	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala - PTUN Denpasar	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan - PTUN Denpasar	TMT 25 September 2025
2.	Putu Eka Aryawati, S.H.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan - PTUN Denpasar	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala - PTUN Denpasar	TMT 25 September 2025
3.	Ni Luh Putu Ayu Kurniasi	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan - PTUN Denpasar	Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan - PTUN Denpasar	TMT 25 September 2025
PTUN MATARAM				



1.	Joko Agus Sugianto, S.H.	Wakil Ketua PTUN Mataram	Ketua PTUN Mataram	TMT 3 Juli 2025
2.	Syamsiah, S.H.	Panitera Pengganti PTUN Mataram	Panitera Muda Hukum PTUN Mataram	TMT 24 September 2025
PTUN KUPANG				
1.	Nur Fitria Idin, A.Md.	Klerik - Pengelola Penanganan Perkara PTUN Kupang	Juru Sita Pengganti PTUN Kupang	TMT 29 September 2025

C. PENSIUN.

Pensiun adalah jaminan hari tua dan balas jasa terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada negara. Pensiun dilaksanakan untuk menjamin produktivitas kerja suatu instansi agar tetap seimbang mengingat semakin bertambahnya usia seorang pegawai maka produktivitas kerjanya pun akan menurun. Berikut adalah daftar pegawai sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram yang telah purna tugas di tahun 2025 :

Daftar Nama Hakim Dan Pegawai Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tun Mataram Yang Telah Purna Tugas Pada Tahun 2025.

NO.	NA MA	JABATAN	PURNA TUGAS TMT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR				
1.	Drs. Anak Agung Gede Sedana	Kasubbag Umum dan Keuangan PTUN Denpasar	31-12-2025	Batas Usia Pensiun
2.	I Wayan Sina, S.H.	Panitera Pengganti PTUN Denpasar	31-12-2025	Batas Usia Pensiun

Program Pensiun merupakan bagian dari program kesejahteraan yang diharapkan bisa memberikan ketenangan PNS dalam bekerja dan mampu memotivasi untuk meningkatkan produktivitas karena adanya suatu jaminan hidup di masa yang akan datang. Dengan adanya



program pensiun maka perencanaan pembinaan masa depan seorang pegawai setelah pensiun dapat terjamin.

D. DIKLAT (SDM TEKNIS / NON TEKNIS YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT)

Secara umum pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada personil dalam meningkatkan kecakapan dan keterampilan mereka, terutama dalam bidang-bidang yang berhubungan dengan kepemimpinan atau manajerial yang diperlukan dalam pencapaian tujuan organisasi.

Untuk membentuk sosok pegawai negeri sipil yang dimaksudkan di atas, diperlukan Diklat yang mengarah pada : Peningkatan semangat dan pengabdian yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat, bangsa, negara dan tanah air. Peningkatan kompetensi teknis, manajerial atau kepemimpinan, peningkatan efisiensi, efektifitas, kualitas pelaksanaan tugas yang dilakukan dengan semangat kerjasama dan tanggungjawab sesuai dengan lingkungan kerja dan organisasi.

Daftar Nama Hakim Dan Pegawai Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tun Mataram Yang Telah Mengikuti Diklat/Bimtek Pada Tahun 2025 :

NO	NAMA	NAMA DIKLAT/BIMTEK	WAKTU PELAKSANAAN
1.	AK Setiyono, S.H., M.H.	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Tindakan Pemerintahan bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia	12 – 14 Februari 2025
2.	AK Setiyono, S.H., M.H.	E-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi 2025	1 – 2 September 2025
3.	AK Setiyono, S.H., M.H.	Pelatihan Tingkat Lanjut Hakim Lingkungan “Penanganan Perkara Lingkungan Hidup yang Berorientasi pada Pemulihan dan Keadilan Iklim”	8 – 12 Oktober 2025
4.	H. Ujang Abdullah, S.H., M.Si.	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Tindakan Pemerintahan bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia	12 – 14 Februari 2025
5.	H. Ujang Abdullah, S.H., M.Si.	E-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi 2025	1 – 2 September 2025
6.	Joko Setiono, S.H., M.H.	Pelatihan Tingkat Lanjut Hakim Lingkungan “Penanganan Perkara Lingkungan Hidup yang Berorientasi pada Pemulihan dan Keadilan Iklim”	8 – 12 Oktober 2025
7.	Sitti Nurce Sapan, S.H.	E-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi 2025	4 – 6 September 2025



8.	Djunaidi, S.T., M.M.	E-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi 2025	11 – 13 September 2025
9.	Winarni, S.E.	Pelatihan Manajemen Risiko Bagi Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung Batch 6	14 – 17 Juli 2025
10.	Lalu Erwin Muryadi, S.H.	Pelatihan Manajemen Risiko Bagi Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung Batch 6	14 – 17 Juli 2025
11.	Efrasia Ranya, S.H.	Peningkatan Kompetensi Pejabat Kepaniteraan Dan Kejurusitaan Peradilan Tata Usaha Negara	26 – 28 Mei 2025
12.	Fanny Agustya Natadiwijaya, S.H., M.H.	Peningkatan Kompetensi Pejabat Kepaniteraan Dan Kejurusitaan Peradilan Tata Usaha Negara	26 – 28 Mei 2025
13.	Lalu Khuznul Muntazi, S.Kom	E-Learning Bendahara Penerimaan Angkatan VI Tahun 2025	7 – 11 Juli 2025
14.	Lalu Khuznul Muntazi, S.Kom	Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	27 November 2025
15.	I Gusti Lanang Wisnu Sentana, S.T., M.M.	Bimbingan Teknis Kepegawaian Bidang Jabatan Fungsional	25 – 28 November 2025
16.	Akbar Mulyawan, S.Adm	Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	27 November 2025
17.	Akbar Mulyawan, S.Adm	Bimbingan Teknis Kepegawaian Bidang Jabatan Fungsional	25 – 28 November 2025
18.	Mohammad Hilmi Himawan, S.A.P., S.H., M.H.	Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	27 November 2025
19.	Mohammad Hilmi Himawan, S.A.P., S.H., M.H.	Bimbingan Teknis Kepegawaian Bidang Jabatan Fungsional	25 – 28 November 2025
20.	Hergi Julian Agashi, S.Psi.	Best Practices Assessment Center in Public and Private Sectors	14 Januari 2025
21.	Adelia Afriliani, S.H.	Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil	18 Januari – 26 Maret 2025
22.	Calfin Fredian Avista, S.H.	Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil	18 Januari – 26 Maret 2025
23.	Sekar Arum Mufaizah, S.T.	Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil	30 September – 13 November 2025
24.	Aulia Sholihat, S.I.Kom.	Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil	30 September – 13 November 2025
25.	M. Iqbal Syuhada, S.Kom.	Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil	30 September – 13 November 2025
PTUN Denpasar			
1.	Luh Putu Utami Rasi Megantari, S.H.	Pelatihan Dasar CPNS Golongan IV Secara Blended Learning Tahun 2025	-
2.	I Gede Khrisan Dharma Putra, S.H.	Pelatihan Dasar CPNS Golongan IV Secara Blended Learning Tahun 2025	-
3.	Simson Seran, S.H., M.H.	Bimtek Pendalama Sengketa Tindakan Faktual Bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara	26 – 28 Mei 2025
4.	Ni Putu Suparwati, S.H.	Bimbingan Tekni Peningkatan Kompetensi Pejabat Kepaniteraan dan Kejurusitaan Pengadilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2025	26 – 28 Mei 2025
5.	I Nyoman Gde Suyana, S.H.	Bimbingan Tekni Peningkatan Kompetensi Pejabat Kepaniteraan dan Kejurusitaan Pengadilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2025	26 – 28 Mei 2025
6.	Anna Leonora Tewernussa, S.H.,	Pelatihan Manajemen Resiko secara Online	30 Juni – 3 Juli 2025



	M.H.	Wilayah Bali Batch IV Tahun 2025	
7.	Indah Mayasari, S.H., M.H.	Pelatihan Manajemen Resiko secara Online Wilayah Bali Batch IV Tahun 2025	30 Juni – 3 Juli 2025
8.	Mohamad Fahrur Risqy, S.H., M.H.	Bimbingan Teknis Pemeriksaan Sengketa Lingkungan Hidup	6 – 8 Juli 2025
9.	Kadek Danendra Pratama, S.H.	Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dan III Kerjasama Pusdiklat BPS Tahun 2025	-
10.	I Wayan Pariarsana, S.H.	Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dan III Kerjasama Pusdiklat BPS Tahun 2025	-
11.	Resty Ayu Wulandari, S.T.	Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dan III Kerjasama Pusdiklat BPS Tahun 2025	-
12.	Gagat Mukti Gumelar, A.Md., M.	Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dan III Kerjasama Pusdiklat BPS Tahun 2025	-
13.	I Dewe Gede Puja, S.H., M.H.	E Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi	28 Agustus – 3 September 2025
14.	Indah Mayasari, S.H., M.H.	E Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi	28 Agustus – 3 September 2025
15.	Wiwid Kurniawan, S.H., M.H.	E Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi	28 Agustus – 3 September 2025
16.	Dr. Ni Made Yeni Widayani, S.H., M.H.	E Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi	28 Agustus – 3 September 2025
17.	I Dewe Gede Puja, S.H., M.H.	Pelatihan Tingkat Lanjut Hakim Lingkungan Penanganan Perkara Lingkungan Hidup yang berorientasi pada pemulihan dan keadaan iklim	6 – 12 Oktober 2025
18.	Indah Mayasari, S.H., M.H.	Pelatihan Tingkat Lanjut Hakim Lingkungan Penanganan Perkara Lingkungan Hidup yang berorientasi pada pemulihan dan keadaan iklim	6 – 12 Oktober 2025
19.	Simson Seran, S.H., M.H.	Pelatihan Tingkat Lanjut Hakim Lingkungan Penanganan Perkara Lingkungan Hidup yang berorientasi pada pemulihan dan keadaan iklim	6 – 12 Oktober 2025
20.	Ivan Pahlavia Islamy, S.H.	Pelatihan Tingkat Lanjut Hakim Lingkungan Penanganan Perkara Lingkungan Hidup yang berorientasi pada pemulihan dan keadaan iklim	6 – 12 Oktober 2025
21.	Mohamad Fahrur Risqy, S.H., M.H.	Pelatihan Tingkat Lanjut Hakim Lingkungan Penanganan Perkara Lingkungan Hidup yang berorientasi pada pemulihan dan keadaan iklim	6 – 12 Oktober 2025
22.	Ryan Surya Pradhan, S.H., M.H.	Pelatihan Tingkat Lanjut Hakim Lingkungan Penanganan Perkara Lingkungan Hidup yang berorientasi pada pemulihan dan keadaan iklim	6 – 12 Oktober 2025
23.	Gasa Bahar Putra, S.H., M.H.	Pelatihan Tingkat Lanjut Hakim Lingkungan Penanganan Perkara Lingkungan Hidup yang berorientasi pada pemulihan dan keadaan iklim	6 – 12 Oktober 2025
24.	Dhafira Jastiana, S.H., M.Kn.	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Tindakan Pemerintah bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara	-
25.	Kadek Ayu Winasari P. S.H.	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera Pengganti Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	13 – 24 Oktober 2025



		Indonesia	
26.	Ayu Sinta Dewi Kusumasari, S.H.	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera Pengganti Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia	13 – 24 Oktober 2025
27.	Ivan Pahlavia Islamy, S.H.	Bimbingan Teknis Sengketa Pertanahan Bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara	4 – 6 November 2025
28.	Kadek Seri Budiyan, S.Pd.	Pelatihan Jarak Jauh Pejabat Pembuat Komitmen Angkatan X	-
PTUN Mataram			
1.	I Gusti Bagus Yuda Perawira, S.H.	Kegiatan Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Golongan III	8 Januari – 26 Maret 2025
2.	Muhammad Helfa Rechtavian, S.H.	Kegiatan Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Golongan III	8 Januari – 26 Maret 2025
3.	Muhammad Adiguna Bimasakti, S.H.	Kegiatan Bimbingan Teknis Pendalaman Sengketa Tindakan Faktual Bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	26 – 28 Mei 2025
4.	Diah Juniar Safitri, S.H., M.Kn.	Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Pejabat Kepaniteraan dan Kejurusitaan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2025	30 Juni – 3 Juli 2025
5.	Eka Sophia Fitri, S.H.	Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Pejabat Kepaniteraan dan Kejurusitaan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2025	30 Juni – 3 Juli 2025
6.	Baiq Yuliani, S.H.	Kegiatan Pelatihan Manajemen Risiko secara online tahun 2025	30 Juni – 3 Juli 2025
7.	Maula Sastaperkasa, S.H.	Kegiatan MOOC Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Golongan III Tahun Anggaran 2025	30 Juni – 9 Juli 2025
8.	I Gusti Komang Wijaya Kesuma, S.H.	Kegiatan MOOC Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Golongan III Tahun Anggaran 2025	30 Juni – 9 Juli 2025
9.	Ihzani Yulistra Yasmin, S.T.	Kegiatan MOOC Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Golongan III Tahun Anggaran 2025	30 Juni – 9 Juli 2025
10.	Hardiansyah Siagian, A.Md.	Kegiatan MOOC Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Golongan III Tahun Anggaran 2025	30 Juni – 9 Juli 2025
11.	Septina Dilan Salsabella, A.Md.M.	Kegiatan MOOC Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Golongan III Tahun Anggaran 2025	30 Juni – 9 Juli 2025
12.	Dr. Vinky Rizky Oktavia, S.H., M.H.	Kegiatan Bimbingan Teknis Pemeriksaan Sengketa Lingkungan Hidup di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja	6 – 8 Juli 2025
13.	Puan Adria Ikhsan S.H., M.Kn.	Pendalaman Sengketa Pertanahan Bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2025	6 November 2025
14.	Azza Azka Norra, S.H., M.H.	Pendalaman Sengketa Pertanahan Bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2025	6 November 2025
15.	Muhammadin Nur Ain S.H.	Training completing the AI for Government of Indonesia	26 November 2025
16.	Diah Juniar Safitri, S.H., M.Kn.	Training completing the AI for Government of Indonesia	26 November 2025



17.	Abdul Aziz, S.Kom.	Training completing the AI for Government of Indonesia	26 November 2025
18.	Iztihaturmah, S.T.	Training completing the AI for Government of Indonesia	26 November 2025
19.	Hardiansyah Siagian, A.Md.	Training completing the AI for Government of Indonesia	26 November 2025
20.	Ihzani Yulistra Yasmin, S.T.	Training completing the AI for Government of Indonesia	26 November 2025
21.	Rahmah, S.H.	Training completing the AI for Government of Indonesia	26 November 2025
22.	Ahdiatul Furqon, A.Md.	Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	1 Desember 2025
23.	Jufri	Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	1 Desember 2025
24.	Amril	Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	1 Desember 2025
25.	Amrillah	Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	1 Desember 2025
26.	Amy Ardiawan	Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	1 Desember 2025
27.	Haerudin, S.Kom.	Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	1 Desember 2025
28.	Abdul Aziz, S.Kom.	Bimbingan Teknis Kepegawaian Bidang Jabatan Fungsional	1 Desember 2025
29.	Mandala Minta Nugraha S.H.,M.H.	Pelatihan Teknis Yudisial Filsafat Hukum untuk Keadilan bagi Hakim Lingkungan Peradilan Umum, Agama, Militer dan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia Gelombang 2	5 Desember 2025
PTUN Kupang			
1.	Darwis Syukur	Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	2025
2.	Frinto Radius Lalang	Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	2025
3.	Manase Hermanus	Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	2025
4.	Melkisedek Seran	Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	2025
5.	Novatsiana aminda Doko, S.P.	Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	2025
6.	Onisimus Cascia Kembo	Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	2025
7.	Rany Haning, S.E.	Bimbingan Teknis Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	2025
8.	Marvin Daniel Pekuwal, S.Kom	Bimbingan Teknis Kepegawaian Bidang Jabatan Fungsional	2025
9.	Marvin Daniel Pekuwal, S.Kom	Belajar Dasar Manajemen Proyek	2025
10.	Marvin Daniel Pekuwal, S.Kom	Pelatihan Jarak Jauh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Angkatan VI (BDK Denpasar) Tahun 2025	2025
11.	Maya Dewinta Tafuli S.H.	Pelatihan Jarak Jauh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Angkatan VIII Tahun 2025	2025
12.	Rio Sanjaya Sirait A.Md.	LATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN II	2025



13.	Pusphitaria Bambang Pardjo S.Pd., S.H., M.A.P.	Pelatiha Jarak Jauh Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Angkatan V	2025
14.	Debora S Anduwacu S.H.	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera Pengganti Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia	2025
15.	Jean Helmi Eka Bolla S.H.	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera Pengganti Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia	2025
16.	I Putu Charles Wiarta Yasa S.H.	Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan IV Tahun 2025	2025
17.	Deska Agriana Permatasari S.H., M.Kn.	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Tindakan Pemerintahan Bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia	2025
18.	Yoshelsa Wardhana S.H.	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Tindakan Pemerintahan Bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia	2025
19.	Pusphitaria Bambang Pardjo S.Pd., S.H., M.A.P.	PJJ Pejabat Pembuat Komitmen Angkatan VI Tahun 2025	2025
20.	Arduyo Wardhana S.H., M.H.	Pelatihan Manajemen Risiko Bagi Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung Batch 5	2025
21.	I Gede Eka Putra Suartana, S.H., M.H.	Pelatihan Manajemen Risiko Bagi Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung Batch 4	2025
22.	Jean Helmi Eka Bolla S.H.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Pejabat Kepaniteraan Dan Kejurusitaan Peradilan Tata Usaha Negara	2025
23.	Maya Dewinta Tafuli S.H.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Pejabat Kepaniteraan Dan Kejurusitaan Peradilan Tata Usaha Negara	2025
24.	Fadhilah Ahmad Subegjo S.H.	Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil	2025
25.	Tb. Hafizh Sulthon Alshazmy S.H.	Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil	2025



BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengelolaan keuangan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram bersumber dari dana APBN yang digunakan untuk membiayai kegiatan Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. Sedangkan sumber lainnya adalah dari Pihak Ketiga untuk membiayai kegiatan administrasi dalam penyelesaian perkara.

Dari kedua sumber tersebut dapat diuraikan pengelolaan keuangannya dengan rincian sebagai berikut :

1. . DIPA NOMOR : SP DIPA- 005.01.2.526736/2025 TGL. 2 DESEMBER 2024

DIPA dengan Nomor : SP DIPA-005.01.2.526736/2025 tertanggal 2 Desember 2024 ini merupakan DIPA yang pengelolaannya berada di Unit Eselon 1 Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. Atau biasa disebut sebagai “DIPA 01”, kata 01 merupakan kode dari Unit Eselon 1 yaitu Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. DIPA 01 ini merupakan DIPA yang dikelola dan dimiliki oleh keempat lingkungan peradilan.

Dalam pengelolaannya DIPA 01 ini telah mengalami beberapa kali revisi, sebagai berikut:

- 1) Revisi DIPA Ke-1 tertanggal 23 Februari 2025;
- 2) Revisi DIPA Ke-2 tertanggal 23 Maret 2025;
- 3) Revisi DIPA Ke-3 tertanggal 16 April 2025;
- 4) Revisi DIPA Ke-4 tertanggal 16 Mei 2025;
- 5) Revisi DIPA Ke-5 tertanggal 28 Mei 2025;
- 6) Revisi DIPA Ke-6 tertanggal 16 Juni 2025;
- 7) Revisi DIPA Ke-7 tertanggal 9 Juli 2025;
- 8) Revisi DIPA Ke-8 tertanggal 22 Juli 2025;
- 9) Revisi DIPA Ke-9 tertanggal 1 September 2025;
- 10) Revisi DIPA Ke-10 tertanggal 23 September 2025;



- 11) Revisi DIPA Ke-11 tertanggal 8 Oktober 2025;
- 12) Revisi DIPA Ke-12 tertanggal 13 Oktober 2025;
- 13) Revisi DIPA Ke-13 tertanggal 24 Oktober 2025;
- 14) Revisi DIPA Ke-14 tertanggal 14 November 2025;
- 15) Revisi DIPA Ke-15 tertanggal 8 Desember 2025.

Adapun realisasi anggaran DIPA 01 pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram berikut satuan kerja yang berada di bawahnya tersaji dalam matriks di bawah ini :

No	Kode Satker	Nama Satker	Pagu Anggaran			Realisasi Anggaran			Realisasi (%)
			Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	
1.	526736	PTTUN Mataram	8,838,207,000	1,576,272,000	33,931,100,000	8,711,619,198	1,553,558,188	33,855,109,905	99,49
2.	559861	PTUN Denpasar	6,185,826,000	1,470,256,000	1,209,239,000	6,067,283,429	1,402,668,354	1,095,909,977	96,62
3.	578871	PTUN Mataram	5,723,108,000	1,420,572,000	482,940,000	5,641,334,266	1,412,549,744	464,571,609	98,58
4.	539121	PTUN Kupang	5,049,594,000	1,356,428,000	206,065,000	4,927,183,485	1,318,929,705	188,266,500	97,31

Dari matriks diatas, jika dilihat dari prosentase realisasi anggaran yang hampir mendekati 100%, merupakan gambaran bahwa pengelolaan anggaran pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram beserta satuan kerja di bawahnya sudah sangat baik.

2. DIPA NOMOR : SP DIPA- 005.05.2.526737/2025 TGL. 2 DESEMBER 2024

DIPA dengan Nomor : SP DIPA- 005.05.2.526737/2025 tertanggal 2 Desember 2024 ini merupakan DIPA yang pengelolaannya berada di Unit Eselon 1 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Biasa disebut sebagai “DIPA 05”, kata 05 merupakan kode dari Unit Eselon 1 yaitu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. DIPA 05 ini, merupakan DIPA yang dikelola dan dimiliki khusus di lingkungan Peradilan

Militer dan TUN, sedangkan lingkungan Peradilan yang lainnya memiliki DIPA dengan kode tersendiri sesuai Unit Eselon 1 / Ditjenjnya masing-masing.

Dalam pengelolaannya DIPA 05 ini telah mengalami beberapa kali revisi, sebagai berikut:

- 1) Revisi DIPA Ke-1 tertanggal 21 Februari 2025;
- 2) Revisi DIPA Ke-2 tertanggal 20 Maret 2025;



- 3) Revisi DIPA Ke-3 tertanggal 22 April 2025;
- 4) Revisi DIPA Ke-4 tertanggal 14 Juli 2025;
- 5) Revisi DIPA Ke-5 tertanggal 7 Oktober 2025;
- 6) Revisi DIPA Ke-6 tertanggal 15 Oktober 2025;
- 7) Revisi DIPA Ke- 7 tertanggal 24 Oktober 2025.

Adapun realisasi anggaran DIPA 05 pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram berikut satuan kerja yang berada di bawahnya tersaji dalam matriks di bawah ini:

No	Kode Satker	Nama Satker	Pagu Anggaran			Realisasi Anggaran			Realisasi (%)
			Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	
1.	526737	PT TUN Mataram	-	49,440,000	-	-	49,166,982	-	99,45
2.	578872	PTUN Mataram	-	62,730,000	-	-	62,706,353	-	99,96
3.	559862	PTUN Denpasar	-	60,385,000	-	-	59,814,200	-	99,05
4.	539122	PTUN Kupang	-	66,105,000	-	-	65,559,993	-	99,18

Dari matriks diatas, jika dilihat dari prosentase realisasi anggaran yang ada pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram dengan satuan kerja di bawahnya sudah sangat baik.

3. PENGELOLAAN KEUANGAN PERKARA

Adapun keadaan pengelolaan Keuangan Perkara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram per 31 Desember 2025, adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai Pengadilan Tingkat Banding

No.	URAIAN	JUMLAH		
		PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5=(3-4)
1.	Saldo Awal	40,000	-	-
2.	Penerimaan	13,750,000	-	-
3.	Biaya Panggilan	-	-	-
4.	Biaya Pemberitahuan	-	-	-
5.	Biaya Pemeriksaan Setempat	-	-	-
6.	Biaya Penerjemah/Sumpah/Saksi	-	-	-



7.	Pengiriman Biaya Perkara	-	-	-
8.	Materai	-	540,000	-
9.	Hak-hak Kepaniteraan	-	-	-
10.	Biaya Proses dan Pemberkasan	-	4,400,000	-
11.	Alat Tulis Kantor	-	8,250,000	-
12.	PNBP	-	-	-
	a. Pencabutan Banding	-	-	-
	b. Surat Pemberitahuan Pencabutan Banding	-	-	-
	c. Redaksi	-	540,000	-
	d. Leges	-	-	-
	Jumlah	13,790,000	13,730,000	60,000

b. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama

No.	URAIAN	JUMLAH		
		PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5=(3-4)
1.	Saldo Awal	1,003,500	-	
2.	Penerimaan	5,696,000	-	
3.	Biaya Panggilan	-	190,500	
4.	Biaya Pemberitahuan	-	284,500	
5.	Biaya Pemeriksaan Setempat	-	-	
6.	Biaya Penerjemah/Sumpah/Saksi	-	-	
7.	Pengiriman Biaya Perkara	-	-	
8.	Materai	-	10,000	
9.	Hak-hak Kepaniteraan	-	390,000	



10.	Alat Tulis Kantor	-	555,000	
11.	Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara	-	3,599,500	
	Jumlah	6,699,500	5,029,500	1,670.000

4. PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bulan Januari s/d Desember 2025 dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram se-wilayah hukum, yang kemudian dilaporkan ke Badan Urusan Administrasi MA RI, adalah seperti dalam tabel di bawah ini :

N O	P O S M A P	URAIAN JENIS PNBP	PT TUN MTR	PTUN MTR	PTUN DPS	PTUN KPG	JUMLAH
1.	425 121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan	520.000	-	20.700.000	-	21.220.000
2.	425 122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	-
3.	425 131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	-	1.470.000	-	-	1.470.000
4.	425 151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	-	15.172.600	14.200.000	12.973.000	42.345.600
5.	425 232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	30.000	2.060.000	2.670.000	1.180.000	5.940.000
6.	425 233	Pendapatan Ongkos Perkara	260.000	3.960.000	4.700.000	2.480.000	11.400.000
7.	425 239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	865.500	11.131.500	14.754.500	6.706.500	33.458.000
8.	425 912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	35.000.000	-	35.000.000
9.	425 913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-	-	-
		JUM LAH	1.675.500	33.794.100	92.024.500	23,339,500	150.833.600



B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

1. Pengadaan

Pada tahun 2025 dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram terdapat kegiatan berupa:

- Belanja Barang :
- Pengadaan Jasa Sewa Mesin Foto Copy Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp264.000.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah) dan realisasi sebesar Rp.263.136.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan metode e-purchasing sesuai dengan Surat Pesanan Nomor: W7-TUN/1097/PL1.1.4/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024 dan pekerjaan telah selesai pada tanggal 2 Januari 2025.
- belanja Modal berupa:
 - a. Pembangunan gedung (Pembangunan Lanjutan) dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp 32.642.600.000,00 (tiga puluh dua milyar enam ratus empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) yang meliputi kegiatan: fisik, perencanaan, pengawas, dan pengelola kegiatan. Pekerjaan tersebut berdasarkan SK POKJA Nomor: 187/Bua.UKPBJ/SK/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024. Untuk pekerjaan Pembangunan gedung sesuai Kontrak Nomor: W7-TUN/259/PL1.1.7/II/2025 tgl 14 Februari 2025, Pekerjaan jasa Konsultasi Pengawasan sesuai dengan Kontrak Nomor: W7-TUN/256/PL1.1.5/II/2025 tanggal 12 Februari 2025 dan Jasa Konsultasi Perencanaan RO Pembangunan Gedung Kantor sesuai Kontrak Nomor: W7-TUN/257/PL1.1.7/II/2025 tgl 4 Februari 2025 pekerjaan telah selesai pada tanggal 15 Desember 2025.
 - b. Pengadaan Fasilitas Perkantoran (AC dan Genset) kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram TA 2025 dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp369.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan metode ePurchasing. Pengadaan genset sesuai dengan Surat Pesanan Nomor: W7-TUN/514/PL1.1.3/V/2025 tanggal 23 Mei 2025 dan pekerjaan telah selesai pada tanggal 30 Juni 2025 dan Pengadaan AC sesuai Surat Perintah Kerja No. W7-TUN/424.a/PL1.1.3/IV/2025 Tgl. 21 April 2025 dan pekerjaan telah selesai pada tanggal 28 April 2025



2. Pemeliharaan

Untuk kegiatan pemeliharaan kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram pada tahun 2025 terdiri atas:

- Pemeliharaan Gedung dan Bangunan meliputi pemeliharaan gedung kantor dan halaman kantor, dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 194.096.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh enam ribu rupiah).
- Pemeliharaan peralatan dan mesin meliputi pemeliharaan alat inventaris kantor berupa BBM sewa kendaraan dinas roda 4 (empat), personal computer, laptop, printer, AC Split, dan inventaris kantor dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp 91.998.000,00 (sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Kegiatan pemeliharaan ini dilaksanakan sepanjang bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2025.

3. Permohonan Pembongkaran dan Penghapusan Aset Barang Milik Daerah Provinsi NTB

Pada tahun anggaran 2025 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram telah mengajukan permohonan Kepada Gubernur Provinsi NTB atas Pembongkaran dan Penghapusan Aset Barang Milik Daerah Provinsi NTB yang digunakan sebagai gedung kantor oleh PTTUN Mataram sesuai Surat Nomor : 1167/KPTTUN.W7/RT1.1.1/XII/2025 Tanggal 4 Desember 2025.

4. Kondisi Sarana dan Prasarana

Pembangunan Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram baru selesai pelaksanaannya ditanggal 15 Desember 2025 sehingga selama tahun 2025 PTTUN Mataram masih menggunakan gedung milik Pemerintah Daerah Provinsi NTB dengan status Pinjam Pakai. Kondisi sarana dan prasarana berupa kondisi gedung kantor, fasilitas kantor (berupa peralatan dan mesin), kendaraan dinas pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram dapat dilihat dalam matrik di bawah ini :

N o	Sarana Prasarana Gedung	Jum lah	Keterangan
	Sarana/Prasarana Gedung		
1	Ruang Ketua	1	Baik
2	Ruang Wakil Ketua	1	Baik
3	Ruang Hakim	5	Baik
4	Ruang Panitera	1	Baik
5	Ruang Sekretaris	1	Baik
6	Ruang Sidang Umum	1	Baik
7	Ruang Kepaniteraan	3	Baik
8	Ruang Kesekretariatan	1	Baik
9	Ruang Arsip	3	Baik
10	Ruang Perpustakaan	1	Baik
11	Ruang Gudang	1	Baik
12	Ruang Server	1	Baik



13	Ruang Mushola	1	Baik
15	Ruang PTSP	1	Baik
19	Toilet	18	Baik
20	Dapur	1	Baik
Prasarana Gedung			
1	A.C. Split	16	Baik
2	Genset	1	Baik
3	Audio Mixing Portable	1	Baik
4	Audio Visual	-	-
5	Brankas	1	Baik
6	Camera Conference	1	Baik
7	Camera Digital	-	-
8	CCTV	7	Baik
9	Facsimile	-	-
10	Filing Cabinet Besi	19	Baik
11	Finger Printer	1	Baik
12	Headmachine Besar	-	-
13	Kipas Angin	4	Baik
14	Kursi Besi/ Metal	123	Baik
15	Kursi Kayu	14	Baik
16	Lambang Garuda Pancasila	3	Baik
17	Komputer	12	Baik
18	Lambang Instansi	-	-
19	Laptop	10	Baik
20	LCD Projector/ Infocus	1	Baik
21	Lemari Besi/ Metal	18	Baik
22	Lemari Kayu	13	Baik
23	Locker	10	Baik
24	Loudspeaker	4	Baik
25	Meja Kerja Kayu	30	Baik
26	Meja Kerja Besi/Metal	29	Baik
27	Meja Komputer	1	Baik
28	Meja Rapat	1	Baik
29	Meja Resepsionis	1	Baik
30	Mesin Fotocopy Folio	1	Baik
31	Mesin Ketik Elektronik/ Selektik	-	-
32	Mesin Ketik Manual	-	-
33	Microphone	1	Baik
34	Palu Sidang	2	Baik
35	Partisi	1	Baik
36	Pataka	2	Baik
37	Printer (Peralatan Personal Komputer)	15	Baik
38	Photo Tustel	-	-
39	Genset	-	-
40	Rak Besi	2	Baik
41	Rak Kayu	-	-



42	Roll Opek		Baik
		1	
43	Sice	1	Baik
44	Sketsel	-	-
45	Sound System	1	Baik
46	Tabung Pemadam Api	5	Baik
47	Tangki Air	1	Baik
48	Telephone (PABX)	-	-
49	Televisi	2	Baik
50	Tiang Bendera	2	Baik
51	UPS	-	-
52	Unit Tranceiver	-	-
53	Wireless Amplifier	1	Baik
54	Auto Switch	-	-
55	Internet	1	Baik
56	Komputer Jaringan Lainnya	-	-
57	Lap Top	5	Baik
58	Line Printer	-	-
59	Modem	-	-
60	P.C Unit	9	Baik
61	Rak Server	1	Baik
62	Router	1	Baik
63	Scanner	2	Baik
64	Server	1	Baik
65	Monografi	-	-
66	Pompa Air	1	Baik
67	Gergaji Chain Saw	-	-
68	Lemari Display	-	-
69	Papan Visual/ Papan Nama	3	Baik
70	White Board	3	Baik
71	Peti Uang/Cash Box	1	Baik
72	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	-	-
73	Printer	20	Baik
74	Treng Air/ Tandon Air	1	Baik
75	Gordyn/ Kray	-	-
76	Software Komputer	-	-
77	Alat Penghancur Kertas	1	Baik
78	Hand Metal Detector	2	Baik
79	Gantungan Jas	5	Baik
80	Video Conference	7	Baik
81	Kursi Roda	1	Baik
82	Akses poin	2	Baik
83	Alat Bantu Dengar	1	Baik
84	Tongkat Disabilitas	1	Baik
	Alat Bantu Jalan	1	Baik
85	Notebook	5	Baik



No.	Jenis Kendaraan	Tahun Perolehan	Kondisi			K e t .
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1.	Kendaraan Bermotor Roda 2 (Dua)	2024	V			
2.	Kendaraan Bermotor Roda 2 (Dua)	2024	V			

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I.	Rumah Dinas	-				
1	Rumah Dinas Ketua	-				
2	Rumah Dinas Wakil Ketua	-				
3	Rumah Dinas Hakim	-				
4	Rumah Dinas Sekretaris	-				

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram dalam pelaksanaa tugas dan fungsi menggunakan beberapa Aplikasi. Aplikasi ini meliputi aplikasi dari Mahkamah Agung, Dirjen Badilmiltun maupun Aplikasi sendiri. Aplikasi tersebut antara lain

- a. Aplikasi E-court
- b. Aplikasi SIPP Lokal
- c. Aplikasi SIPP Banding
- d. Aplikasi E-lap
- e. Aplikasi Simpan
- f. Aplikasi e-survey
- g. Website
- h. Aplikasi pendaftaran e-barcode Bagi Pengguna Lain
- i. Aplikasi E-Arsip Hukum

- IMPLEMENTASI E-COURT

Secara umum pada tahun 2025, seluruh perkara yang masuk ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram sudah menggunakan ecourt. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memiliki dua kewenangan yakni sebagai tingkat pertama dan sebagai tingkat banding. Pada tahun 2025 sebagi tingkat pertama PTTUN Mataram menerima 2 perkara dan sebagai tingkat banding menerima sebanyak 55 perkara.



- **IMPLEMENTASI SIPP**

Implementasi SIPP untuk tahun 2025 meliputi penyelesaian 55 perkara banding yang masuk dan terdaftar melalui Aplikasi SIPP, dan 2 perkara tingkat pertama. Kesemuanya berjalan dengan baik dan lancar.



BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. INDEKS KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN

Pelaksanaan survey dilakukan dengan regulasi sebagai berikut:

- 1) Sesuai SK KMA Nomor: 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penganganan Pengaduan pada Badan Peradilan;
- 2) SK KMA Nomor 2-144 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
- 3) SK KMA Nomor 026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
- 4) Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Berdasarkan peraturan tersebut bahwa peningkatan pelayanan publik dapat dilakukan dengan melakukan survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) agar mendapat masukan dari masyarakat bagaimana kondisi dengan pelayanan di pengadilan, sehingga perbaikan layanan dapat selalu dilakukan dengan mendapat masukan dari masyarakat sehingga pelayanan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya pengguna layanan di pengadilan.

Hasil Survey pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. SKM (Survey Kepuasan Masyarakat): Nilai **3,66/4**
2. IPK (Indeks Persepsi Korupsi) sebagai berikut: Nilai **3,91/4**.

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau Mahkamah Agung berupaya melakukan perubahan sistem pelayanan dengan menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram mulai beroperasi pada tanggal 12 Desember 2022 dan sudah menyediakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berdasarkan standar pelayanan terpadu satu pintu sebagai mana Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor



109/DJMT/KEP/VII/2024 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang meliputi sebagai berikut :

1. Meja Pengaduan dan Informasi

Petugas meja pengaduan dan informasi bertugas menerima permohonan informasi dan memberikan informasi sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/III/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Disamping itu juga melayani penanganan pengaduan/SIWAS-MARI dan layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum.

2. Pelayanan Perkara / E-Court Layanan ini dilakukan oleh petugas pendaftaran yang sebelumnya disebut petugas Meja 1. Pelayanan yang diberikan termasuk diantaranya pelayanan terkait pendaftaran perkara / gugatan dan pengajuan upaya hukum. Selain itu, juga ada pemberian layanan dalam hal pembayaran biaya panjar dimana sebelumnya dilakukan oleh petugas yang disebut kasir. Pelayanan yang diberikan meliputi penaksiran panjar biaya perkara / gugatan dan penyerahan bukti-bukti pembayaran.

3. Pelayanan Hukum Pelayanan yang diberikan antara lain permohonan pendaftaran surat kuasa.

4. Pelayanan Umum / Kesekretariatan Petugas pelayanan umum bertugas menerima dan menyerahkan seluruh surat- surat yang ditujukan dan yang dikeluarkan kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram.

Sarana dan prasarana telah tersedia dengan baik serta petugas pelayanan terpadu yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik di bawah koordinator kepaniteraan hukum dan kepaniteraan perkara. Pelaksana piket layanan dilaksanakan oleh Staf yang ditunjuk dan dibantu oleh beberapa orang tenaga PPPK sebagai asisten umum.



C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

1. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram

- 1) **SI BAPERAN** inovasi yang dibuat untuk permudah penyimpanan berkas secara elektronik di PTTUN Mataram;
- 2) **e-Arsip Hukum** merupakan inovasi penyimpanan digital yang berisi berkas putusan perkara in-aktif, arsip administrasi di bagian kepaniteraan hukum seperti laporan-laporan perkara baik di PTTUN Mataram dan PTUN Sewilayah PTTUN Mataram;
- 3) **Layanan Barcode Bagi Pengguna Lain** merupakan inovasi layanan pendaftaran e- Court bagi pengguna lain (Kuasa Non Advokat);

Selain inovasi yang telah berjalan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram juga terus mengembangkan berbagai inovasi baik untuk pelayanan eksternal maupun internal, beberapa inovasi merupakan aktualisasi Calon Pegawai Negeri Sipil diantaranya:

- 1) **SIMANTAP (Sistem Manajemen Tamu Pintar)** merupakan inovasi untuk menggantikan sistem pencatatan manual menjadi sistem berbasis digital yang dapat mencatat, menyimpan, dan menampilkan data tamu secara real time, sekaligus meningkatkan citra pelayanan publik yang profesional dan modern;
- 2) **SI-ASRI (Sistem Aset Ruangan Inventaris)** merupakan inovasi sebagai bentuk mengoptimalkan pemanfaatan SIMAN & e-Sadewa di PTTUN Mataram, menyediakan database/dashbord internal untuk monitoring BMN secara real-time, dan mendukung keteraturan kerja ASN sekaligus akuntabilitas pengelolaan aset negara;
- 3) **Kalender dan Sistem Pengingat Digital** merupakan inovasi pengingat kegiatan-kegiatan kantor untuk mendukung pengumuman/pengingat selain melalui grup whatsapp.



2. Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram

- 1) **APE** (Aplikasi Persuratan Elektronik), inovasi digital untuk mengelola administrasi persuratan secara efisien, cepat, dan ramah lingkungan;
- 2) **PANGSID** (Panggilan sidang elektronik), merupakan aplikasi para pihak yang berperkara untuk segera memasuki ruang sidang;
- 3) **Aplikasi ADiT**, merupakan kepanjangan dari **Asisten Digital Tergintegras** PTUN Mataram yang telah terintegras dengan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara). Aplikasi ini menyediakan kebutuhan akan informasi khususnya di Pengadilan TUN Mataram yang dikirim melalui aplikasi *chatting* yang paling populer saat ini yaitu **WHATSAPP** baik secara otomatis maupun secara manual oleh admin;
- 4) **Mesin Antrian Sidang**, mesin yang di peruntukkan bagi para pihak untuk mengambil antrian untuk persidangan secara luring, seperti agenda sidang pemeriksaan persiapan, sidang pembuktian, dan sidang kesaksian para pihak.
- 5) **Pojok Pelayanan Mandiri (PPM)**, menyediakan berbagai informasi yang dapat diakses melalui satu monitor, antara lain website resmi PTUN Mataram, SIPP PTUN Mataram, SIPP Tingkat Banding, e-Court, Adit PTUN MTR, struktur organisasi, profil hakim, sistem pengawasan, JDIH Mahkamah Agung, jadwal persidangan, direktori putusan, survei kepuasan pengadilan dan survei persepsi korupsi;
- 6) **Sistem Informasi Arsip Digital "SIARDI" PTUN MATARAM** adalah inovasi digital PTUN Mataram yang dirancang untuk mengelola arsip secara elektronik;
- 7) **Sistem Aplikasi Pengumpul Data Laporan "Si APDaL" PTUN MATARAM** adalah sebuah inovasi teknologi yang dirancang untuk mempermudah pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram. Aplikasi ini memungkinkan pengumpulan data secara otomatis dan real-time, meningkatkan efisiensi administrasi, serta mengurangi potensi kesalahan manual;

Selain inovasi yang telah berjalan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram juga terus mengembangkan berbagai inovasi baik untuk pelayanan eksternal maupun internal, beberapa inovasi merupakan aktualisasi Calon Pegawai Negeri Sipil diantaranya:

- 1) **PPID-PTUN Mataram**
- 2) **Posbakum Go Online**
- 3) **SIMBA (Sistem Informasi Manajemen Barang dan Aset)**



- 4) **Buku Panduan Etika dan Cara Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas PTUN Mataram Berbasis QR CODE**
- 5) **Si ARDI GO (Sistem Informasi Arsip Digital Go Online)** merupakan optimalisasi dari aplikasi Siardi
- 6) **E-SOVER (E-form, SOP, Video Tutorial, Flyer)**
- 7) **Formulir Pelayanan Permohonan Surat Keterangan Bebas Perkara (SKBP)**

3. Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar

- 1) **SI WAYAN PLUS** atau sistem informasi Whatsapps Pelayanan merupakan sebuah inovasi menggunakan aplikasi pesan whatsapp yang dilengkapi dengan fitur balas pesan otomatis;
- 2) **SI SANTI PLUS** merupakan singkatan dari Single Service Administrasi Terintegrasi Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang mana mempermudah masyarakat dalam mengajukan:
 1. Permohonan Kuasa Insidentil
 2. Permohonan Keterangan Bebas Perkara
 3. Permohonan Penelitian
- 3) **PTSP Online** merupakan pelayanan pengadilan yang dilakukan secara online untuk menghemat waktu dan biaya tanpa harus datang ke kantor PTUN Denpasar, layanan ini dilengkapi dengan alat pembaca layar (screen reader) sehingga pengguna tunanetra dapat memahami isi dari informasi yang tertulis.

4. Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

- 1) **E-PPID PTUN Kupang** merupakan media layanan informasi, sebagai bentuk keterbukaan informasi publik pada PTUN Kupang dan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
- 2) **SIPPARI (Sistem Pencatatan Peminjaman Berkas Perkara Online yang telah BHT)** merupakan Pencatatan peminjaman dan pengembalian berkas perkara yang telah BHT (Berkekuatan Hukum Tetap) dilakukan dengan sistem terstruktur untuk memastikan



keterlusuran dan keamanan arsip perkara;

- 3) **Buku Bantu ATK Perkara** merupakan alat pencatatan administratif yang berfungsi untuk mencatat, mengelola, dan melacak penggunaan alat tulis kantor (ATK) yang digunakan dalam penyelesaian perkara di pengadilan. Buku ini berperan penting dalam memastikan transparansi penggunaan ATK yang menjadi bagian dari proses perkara;
- 4) **Daftar Buku Tamu Elektronik** merupakan inovasi untuk mengontrol data pengunjung PTUN Kupang;
- 5) **SIMORA (Inovasi Sistem Monitoring Sarana dan Prasarana)** merupakan sistem sederhana berbasis Google Form - Google Sheet – Google Calender untuk lapor kerusakan sarana dan prasarana serta tindak lanjutnya dan membuat jadwal pemeliharaan rutin serta tindak lanjutnya;
- 6) **Posbakum Online** merupakan layanan Pos Bantuan Hukum secara online melalui Teleconference menggunakan Aplikasi Zoom Meeting;
- 7) **SIPERON (Sistem Permohonan Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap Online)** hadir sebagai inovasi layanan berbasis digital untuk mempermudah masyarakat dalam mengajukan permohonan Surat Keterangan BHT secara cepat, transparan, dan akuntabel.



BAB VI

PENGAWASAN

A. INTERNAL

Salah satu fungsi Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram adalah melakukan pembinaan dan pengawasan. Dalam pelaksanaannya, fungsi ini dijalankan oleh unsur Pimpinan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram (Ketua dan Wakil Ketua) dibantu oleh Pejabat yang ditunjuk. Adapun yang menjadi sasaran pembinaan dan pengawasan adalah para aparatur Pengadilan (Hakim, pejabat dan pegawai) baik yang berada di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram sendiri maupun yang berada di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram.

Kegiatan pembinaan untuk lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan. Secara formalnya, dilakukan oleh pimpinan pada forum rapat bulanan yang dihadiri oleh seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram (pimpinan, Hakim, Pejabat dan Pegawai). Pada forum tersebut dilakukan evaluasi-evaluasi pelaksanaan tugas seluruh komponen dan teguran-teguran oleh pimpinan terhadap beberapa penyimpangan yang terjadi. Hakim Pengawas Bidang yang merupakan kepanjangan tangan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram dalam melakukan pengawasan internal di setiap bidang dan bagian telah dilaksanakan dengan baik berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 1125/KPTTUN.W7/SK.HK1.2.5/XI/2025 Tanggal 21 November 2025.

B. EVALUASI

Kegiatan pengawasan untuk lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan untuk hal-hal tertentu didelegasikan kepada Hakim Tinggi Pengawas Daerah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram. Secara formalnya, hasil pengawasan oleh Pimpinan dan Hakim Tinggi Pengawas Daerah, disampaikan oleh pimpinan pada forum rapat bulanan yang dihadiri oleh seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram (pimpinan, hakim tinggi, pejabat dan pegawai). Pada forum tersebut dilakukan evaluasi- evaluasi



pelaksanaan tugas seluruh komponen dan teguran-teguran oleh pimpinan terhadap beberapa penyimpangan yang terjadi.

Hal-hal yang dilakukan dalam rangka kegiatan pengawasan di daerah / Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah :

1. Evaluasi penyelenggaraan peradilan yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersangkutan baik Teknis maupun Non Teknis, dengan berpedoman pada Buku IV tentang Pengawasan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI;
2. Evaluasi terhadap penerapan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung RI dan Pimpinan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram yang telah disampaikan oleh Pimpinan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram pada waktu kegiatan pembinaan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;
3. Melakukan teguran dan atau pemeriksaan terhadap hal-hal yang perlu dilakukan peneguran / pemeriksaan oleh Tim Pengawas dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram;
4. Melakukan tindakan-tindakan lain selain sebagaimana tersebut diatas, atas perintah Pimpinan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram.

Untuk Tahun Anggaran 2025 ini, Pembinaan oleh Pimpinan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram ke seluruh satuan kerja di daerah dan Pengawasan Kesekretariatan maupun Kepaniteraan oleh Hakim Pengawas Daerah telah dilaksanakan dengan baik. Adapun rincian kegiatannya adalah sebagai berikut :



BAB VII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari seluruh uraian yang ada dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 ini, dapatlah diambil kesimpulan bahwa secara umum, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram selama tahun anggaran 2025 telah berjalan dengan baik.

Dari pemaparan seluruh kegiatan dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan di Tahun 2025 ini, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Tupoksi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, adalah sebagai berikut :
 - a. Tugas Teknis Yuridis, meliputi :
 - 1) Sebagai Pengadilan Tingkat Banding;
 - 2) Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama;
 - 3) Sebagai Pengadilan yang memutus sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Tata Usaha Negara dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram.
 - b. Tugas Administrasi, meliputi :
 - 1) Pelaksanaan administrasi persidangan;
 - 2) Pelaksanaan administrasi kepaniteraan;
 - 3) Pelaksanaan administrasi umum dan pembangunan;
 - c. Tugas Pengawasan, meliputi :
 - 1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas (pengawasan melekat dan pengawasan fungsional);
 - 2) Pengawasan terhadap aparatur pengadilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan;
 - 3) Pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - d. Tugas Pelayanan Masyarakat, meliputi :
 - 1) Pelayanan prima terhadap masyarakat;



- 2) Pelayanan prima terhadap internal pengadilan;
 - 3) Pelayanan prima instansi atasan dan atau instansi lain / pemangku kepentingan lainnya;
 - e. Tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Agar jelas arah dan sasaran organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram telah menyusun Rencana Strategi 2024 – 2029 dengan memperhatikan dan menganalisa lingkungan eksternal dan lingkungan internal pengadilan sehingga diperoleh key success factor (faktor-faktor yang dapat mensukseskan dalam pencapaian sasaran) dan juga diperoleh faktor-faktor penghambat dalam mencapai sasaran untuk dipakai di dalam merumuskan strategi-strategi dalam mencapai sasaran organisasi;
 3. Jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram adalah relative masih sedikit, sehingga beban kerja Majelis Hakim dan pejabat fungsional pengadilan lainnya dalam menangani perkara juga relative lebih ringan;
 4. Penyelesaian perkara-perkara yang masuk ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram sudah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu tidak melebihi 3 (tiga) bulan sejak perkara diterima hingga diputusnya perkara-perkara tersebut;
 5. Promosi, Mutasi dan Pensiun bagi aparatur dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram sudah terlaksana dengan baik berdasarkan ketentuan yang berlaku dan telah melalui analisa dan evaluasi dari Tim Baperjakat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram;
 6. Pengelolaan Keuangan baik yang bersumber dari dana APBN dan pengelolaan keuangan perkara telah dilaksanakan dengan baik, yang tercermin dengan adanya realisasi, pembukuan dan laporan keuangan yang tersaji dari Januari hingga Desember 2025;
 7. Pengelolaan Sarana Prasarana telah dilaksanakan dengan baik, mulai dari kegiatan pengadaan, pemeliharaan, penghapusan dan laporan kondisi sarana dan prasarana yang tersaji dan terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku;

B. REKOMENDASI

1. Perlu adanya upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan terhadap personil Pengadilan baik teknis maupun non teknis dengan sistem pembinaan dan pelatihan secara berkelanjutan dan berkesinambungan, guna dihasilkan tenaga yang terampil secara teknis, organisatoris dan professional di bidangnya;
2. Kebutuhan sarana dan prasarana baik gedung maupun fasilitas gedung mohon untuk



dipenuhi dengan menggunakan skala prioritas sesuai dengan dana yang tersedia, sebagai sarana penunjang kinerja dalam pelaksanaan tupoksi;

3. Peningkatan kualitas kegiatan Pembinaan dan Pengawasan baik dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan;
4. Kekurangan pegawai, terutama untuk staf golongan II, mohon juga segera dipenuhi, khususnya bagi satker-satker yang sangat minim tenaga stafnya;

Mataram, 29 Januari 2026

**Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Mataram,**



[Signature]
AK. Setiyono.



LAMPIRAN

1. Evidence Rapat Penyusunan Program Kerja



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM**

Jl. Mahoni No. 3, Kel. Morjok Barat, Kec. Selaparang - Kota Mataram 83122
Telp. (0370) 7862434, Web: pttun-mataram.go.id, e-Mail: info@pttun-mataram.go.id
MATARAM - NTB

Mataram, 23 Januari 2026

Nomor : *64* /W7-TUN/OT1.6/1/2026
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat Finalisasi Penyusunan
Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2025 dan
Program Kerja 2026

Kepada Yth.
Tim Penyusunan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2025 dan Program
Kerja 2026 PTTUN Mataram
di- Tempat

Dengan hormat,

Mengingat masing-masing bagian telah mengirimkan data untuk menyusun laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2025 dan program kerja tahun 2026, oleh karena itu untuk mensinkronkan data yang diinput dengan laporan yang telah dibuat sebagai langkah terakhir untuk penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2025 dan Program Kerja 2026, maka kami mengundang Bapak/Ibu anggota tim untuk menghadiri rapat pada :

Hari / Tanggal : Senin, 26 Januari 2026
Jam : 10.00 Wita
Tempat : Command Center PTTUN Mataram
Agenda : Rapat Final Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan
2025 dan Program Kerja 2026

Demikian undangan ini dibuat dan atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih

Ketua Tim,

H. UJANG ABDULLAH, S.H., M.Si.
NIP. 196407101989031001



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM**

Jl. Mahoni No. 3, Kel. Monjok Barat, Kec. Selaparang – Kota Mataram 83122
Telp. (0370) 7862434, Web: pttun-mataram.go.id, e-Mail: info@pttun-mataram.go.id
MATARAM - NTB

**NOTULEN RAPAT
FINALISASI PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025 DAN
PROGRAM KERJA 2026**

Nomor : W7-TUN/ 69 /0T1.6/1/2026

Hari / Tanggal : Senin, 26 Januari 2026
Waktu : 10.00 Wita
Acara : Rapat Finalisasi Penyusunan Laporan
Pelaksanaan Kegiatan 2025 dan Program Kerja
2026
Pimpinan Rapat : Wakil Ketua / Ketua Tim Penyusunan Laporan
Pelaksanaan Kegiatan 2025 dan Proker 2026

Pada hari ini Senin, Tanggal 26 Januari 2026, bertempat di ruang Command Center Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, telah dilaksanakan Rapat Finalisasi Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2025 dan Program Kerja 2026 yang di hadiri oleh seluruh Tim Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2025 dan Program Kerja 2026 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram.

Adapun hasil rapat monitoring dan evaluasi SAKIP sebagai berikut .:

1. Ketua tim memulai rapat dan memberi beberapa arahan yang berkaitan dengan Renstra dan Indikator Kinerja Utama
2. Sesuai dengan kesepakatan rapat sebelumnya, bahwa hari ini akan ditayangkan dimonitor Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 dan Proker 2026 masing-masing bagian.
3. Setiap Bagian diwajibkan untuk mengoreksi kembali data-data yang telah diinput ke dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2025 dan Proker 2026
4. Ada beberapa yang perlu diperbaiki terkait dengan penulisan maupun perbaikan data terutama yang berkaitan dengan bagian perkara dan bagian keuangan
5. Begitu pula dengan program kerja 2026 ada berapa bagian yang diperbaiki saat itu juga dan ada yang tidak bisa diperbaiki saat itu.
6. Diminta kepada Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran agar segera memperbaiki Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 dan Proker 2026 dan jika sudah agar segera ditandatangani oleh Ketua PTTUN Mataram.

Kemudian rapat ditutup pada jam 11.30 Wita

Demikian hasil Rapat Finalisasi Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2025 dan Program Kerja 2026 dibuat dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Ketua Tim,

H. UJANG ABDULLAH, S.H., M.Si.
NIP. 198407101989031001

Notulis,

SYAMSUL SYAIFUL, SH.
NIP. 197412261993031001



DAFTAR HADIR
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM

Nama Kegiatan : Rapat Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 dan
Program Kerja Tahun 2026
Tempat : Command Center Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram
Hari / Tgl : Senin / 26 Januari 2026
Pukul : 14.00 WITA s.d. selesai

No.	Nama	Jabatan	Ttd/ Paraf	Keterangan
1.	H. Ujang Abdullah	wakil Kehs		-
2.	Liti Nurce Sapan	Panitera		
3.	Dharmadi	sekretaris		
4.	L. Erwani M	Adm. Hutan		
5.	L. KURNIA M	kasus		
6.	Anggo E	Korabag. RPT		
7.	Winarni	Kabag		
8.	Leli Suparni	Panmud Plur		
9.	Fanny Agustina	JP		
10.	Rita L.	KASUS		
11.	Tu panama rani	Kasus		
12.	Calvin F.A	APP		
13.	Syamsul S	Kabag.		
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				



**FOTO RAPAT FINALISASI PENYUSUNAN LAPORAN
PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025 DAN PROGRAM KERJA
2026**



